



XINHUA

## PERTEMUAN BILATERAL TUNISIA DAN ITALIA

Presiden Tunisia Kais Saied (kanan) bertemu dengan Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani yang sedang berkunjung di Tunis, Tunisia, Rabu (18/1). Pejabat senior Tunisia dan Italia bertemu pada hari Rabu di Tunis, bersumpah untuk bersama-sama memerangi imigrasi ilegal, menurut kepresidenan Tunisia.

# Menteri Keuangan AS dan PM Tiongkok Sepakat Perkuat Komunikasi

Kedua belah pihak sepakat memperkuat kerja sama pada iklim keuangan dalam dasar bilateral maupun multilateral.

**ZURICH (IM)** - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen sepakat dengan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He untuk memperkuat komunikasi dalam isu keuangan dan ekonomi makro. Dalam pertemuan “yang jujur, substantif dan konstruktif” di Zurich, Rabu (18/1).

Dalam pernyataannya, Kementerian Keuangan AS mengatakan, kedua belah pihak sepakat memperkuat kerja sama pada iklim keuangan dalam dasar bilateral maupun multilateral. Seperti di PBB, kelompok 20 perekonomian terbesar di dunia atau G-20 dan APEC.

“Meski terdapat beberapa bidang yang tidak kami sepakati, dan kami akan menyampaikannya secara langsung,

kami tidak boleh membiarkan kesalahpahaman, terutama yang disebabkan lemahnya komunikasi, memperburuk hubungan ekonomi dan keuangan bilateral kami,” kata Yellen di awal pertemuan.

Liu mengatakan kedua negara membutuhkan “komunikasi serius” dan koordinasi dalam berbagai isu termasuk perubahan iklim dan ekonomi. Ia menegaskan siap melakukan pertukaran mendalam.

“Kami yakin kami harus mengingat gambaran yang lebih besar, untuk mencoba mengelola perbedaan kami dengan tepat dan mencari kesamaan, dalam cara ini, kami berharap dapat bekerja sama untuk menjaga seluruh stabilitas hubungan Tiongkok-AS,” kata Liu.

Di sela pertemuan di forum G-20 di Bali, Indonesia, November tahun lalu lalu, Presiden AS Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping berjanji meningkatkan komunikasi antara dua negara.

“Kedua belah pihak sepakat penting fungsi ekonomi global untuk memperluas penguatan komunikasi di isu keuangan dan ekonomi makro,” kata Kementerian Keuangan AS usai pertemuan Yellen dan Liu.

“Menteri Yellen juga mengangkat isu-isu yang diperhatikan dalam pertukaran pandangan yang jujur, ia menantikan dapat berkunjung ke Tiongkok dan menyambut rekannya di Amerika Serikat dalam waktu dekat,” tambah kementerian.

Pejabat Kementerian Keuangan AS mengatakan dalam pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam itu, Yellen dan Liu sepakat kedua negara mengambil langkah untuk mencegah resesi di ekonomi masing-masing. Dua

delegasi juga menggelar pembicaraan produktif mengenai utang negara, keamanan pangan dan energi.

Pejabat itu mengatakan dalam prospek ekonomi, Tiongkok menyadari risiko yang ditimbulkan sektor properti tapi mereka optimistis pertumbuhan dalam kembali normal. Pertemuan di Zurich menjadi tatap muka pertama menteri keuangan dengan pejabat pemerintah Tiongkok sejak Yellen menjabat.

Dalam pernyataannya Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan dalam pertemuan itu Beijing mengungkapkan keprihatinan pada kebijakan-kebijakan ekonomi, perdagangan, dan teknologi AS pada Tiongkok. Beijing berharap AS memperhatikan kebijakan-kebijakan itu dapat berdampak pada kedua negara.

“Tiongkok menyambut Yellen untuk berkunjung ke Tiongkok di waktu yang tepat tahun ini. Kedua negara sepakat tim ekonomi dan

perdagangan mereka akan melanjutkan komunikasi dan pertukaran di semua tingkat,” kata kementerian.

Pada Oktober lalu Washington memberlakukan kontrol pada ekspor Tiongkok untuk menahan perkembangan teknologi dan militernya. Termasuk menahan akses Tiongkok ke peralatan produksi cip AS dan memngkas akses mereka ke cip yang diproduksi di mana di seluruh dunia dengan peralatan AS.

Sejak menjabat Yellen sudah bertemu secara virtual dengan Liu dan di Bali ia bertemu dengan Gubernur Bank Sentral Tiongkok Yi Gang. Liu akan mundur tahun ini dalam perombakan kepemimpinan kebijakan ekonomi Tiongkok yang diumumkan September tahun lalu.

Bulan Desember Yellen mengatakan ia terbuka untuk berkunjung ke Tiongkok. Ia menantikan “interaksi yang lebih intensif” dengan pejabat pemerintah Tiongkok. ● tom

## Ribuan Pekerja Mogok Massal Usai Prancis Berencana Ubah Usia Pensiun Jadi 64 Tahun

**PRANCIS (IM)** - Ribuan serikat pekerja Prancis pada Kamis (19/1) menggelar aksi mogok dan demonstrasi setelah Pemerintah berencana mengubah usia pensiun. Rancangan Undang-Undang (RUU) baru yang akan disahkan parlemen akan menaikkan usia resmi di mana orang dapat berhenti bekerja dari 62 tahun menjadi 64 tahun.

Dikutip BBC, layanan kereta api antarkota dan komuter diperkirakan akan sangat terganggu. Banyak sekolah dan layanan publik lainnya ditutup. Di bandara Orly di Paris, satu dari lima penerbangan telah dibatalkan.

Di metro Paris hanya dua jalur tanpa pengemudi yang akan berfungsi normal. Demonstrasi besar yang menarik puluhan ribu orang diperkirakan terjadi di Paris dan kota-kota lain, di mana polisi akan dikerahkan jika terjadi kekerasan dari penyusup “blok hitam” ultra-kiri.

Di bawah proposal yang diuraikan awal bulan ini oleh Perdana Menteri (PM) Elisabeth Borne, mulai 2027 orang harus bekerja 43 tahun untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan pensiun penuh, dibandingkan dengan 42 tahun sekarang.

Dipuji oleh pemerintah sebagai langkah penting untuk melindungi sistem pensiun bagi Prancis, reformasi tersebut terbukti sangat tidak populer di kalangan masyarakat - dengan 68% mengatakan mereka menentang, menurut jajak pendapat IFOP minggu ini.

Semua serikat pekerja negara - termasuk apa yang disebut serikat pekerja “reformis” yang diharapkan pemerintah - telah mengutuk tindakan tersebut, seperti halnya oposisi sayap kiri dan sayap kanan di Majelis Nasional.

Karena partai Renaissansnya tidak memiliki mayoritas di Majelis, Macron akan terpaksa mengandalkan dukungan dari

sekitar 60 anggota parlemen dari partai Republik konservatif. Meskipun pada prinsipnya mendukung reformasi pensiun, bahkan beberapa dari mereka telah memperingatkan bahwa mereka dapat memberikan suara menentang.

Dengan proses parlementer yang diperkirakan akan memakan waktu beberapa minggu, Macron menghadapi kampanye oposisi yang bergulir, dengan kemungkinan tindakan lebih lanjut di hari-hari mendatang. Hasil terburuk bagi pemerintah adalah pemogokan bergilir di transportasi, rumah sakit, dan depot bahan bakar - yang secara efektif membuat negara terhenti.

Analisis politik sepakat bahwa mood negara sulit diukur, jadi tidak mungkin memprediksi apakah skala gerakan akan cukup untuk memaksa presiden mundur. Jika itu terjadi, itu bisa menandai akhir dari reformasi serius apa pun dalam masa jabatan keduanya ini.

Di satu sisi, inflasi, krisis energi, dan laporan layanan publik yang terus menurun telah membuat banyak orang merasa cemas dan mudah marah. Citra buruk Presiden Macron di luar kota-kota makmur berkontribusi pada pemberontakan “rompi kuning” empat tahun lalu, dan bisa saja terjadi lagi.

Namun di sisi lain, lembaga survei juga mengidentifikasi rasa pasrah di antara banyak orang, yang tidak lagi mengidentifikasi diri dengan gerakan sosial “jadul” seperti spesialisasi serikat pekerja. Banyak juga yang akan terlalu khawatir tentang hilangnya pendapatan sehari-hari. Untuk mogok.

Sementara itu, PM menggunakan prinsip “solidaritas antar generasi” untuk membenarkan keputusan membuat orang bekerja lebih lama. Di bawah sistem Prancis, sangat sedikit orang yang memiliki program pensiun pribadi yang terkait dengan investasi modal. ● gul

## Peraih Hadiah Nobel Maria Ressa Dibebaskan dari Kasus Pajak

**MANILA (IM)** - Peraih hadiah Nobel dari Filipina, Maria Ressa dan media yang ia dirikan Rappler dibebaskan dari dakwaan penggelepan pajak. Organisasi media dan hak asasi manusia mengatakan, keputusan ini kemenangan bagi kebebasan pers dan supremasi hukum.

Ressa yang menerima hadiah Nobel perdamaian bersama jurnalis Rusia pada 2021 merupakan pemimpin Rappler. Media dengan reputasi laporan mendalam dan kritis pada mantan presiden Rodrigo Duterte dan operasi antinarkoba.

Pembebasan tidak hanya untuk Rappler ini untuk setiap warga Filipina yang dituduh dengan tidak adil,” kata Ressa usai keputusan dibacakan, Kamis (19/1).

Badan penerimaan negara Filipina menuduh Rappler menggelapkan pajak pengembalian hasil penjualan saham ke investor asing. Kasus ini

menjadi dasar regulator sekuritas mencabut izinnya.

Pengadilan pajak mengatakan, keputusan membebaskan Ressa dan Rappler diambil karena jaksa penuntut tidak dapat membuktikan pelanggaran tanpa keraguan. Departemen Kehakiman Filipina mengatakan menghormati keputusan pengadilan.

Ressa yang saat ini bebas dengan jaminan mengajukan banding hukuman enam tahun penjara yang dijatuhkan pada 2020 atas pencemaran nama baik. Ia sudah melawan gugatan pemerintah sejak 2018 yang ia sebut sebagai serangkaian pola serangan.

Kesulitan yang Ressa hadapi menimbulkan kekhawatiran internasional mengenai serangan terhadap media di Filipina yang digambarkan salah satu negara paling berbahaya bagi jurnalis di Asia.

Organisasi hak asasi manusia dan pengawas media memuji keputusan pengadilan. Mereka

mengatakan keputusan ini kemenangan bagi jurnalis dan supremasi hukum.

“Ini kemenangan bagi kebebasan pers di Filipina,” kata peneliti senior Human Rights Watch, Carlos Conde dalam pernyataannya.

Conde mengatakan tantangan bagi pemerintah Presiden Ferdinand Marcos Jr adalah mencatat hal ini dan “memastikan jurnalis melakukan pekerjaannya tanpa rasa takut.”

Pada bulan Oktober lalu seorang jurnalis radio ditembak hingga tewas. Salah satu pembunuhan pada wartawan dalam satu dekade terakhir.

Filipina berada di urutan 147 dari 180 negara di indeks kebebasan pers dunia tahun 2022. Pada tahun 2021 Komite Perlindungan untuk Jurnalis menempatkan negara itu peringkat ketujuh indeks impunitas yang melacak negara yang membebaskan pembunuh wartawan. ● ans

## PM Selandia Baru dan Penasihat Presiden Ukraina Mengundurkan Diri

**WELLINGTON (IM)** - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya.

Dalam pertemuan kaukus tahunan Partai Buruh pada Kamis (19/1), Ardern mengatakan dia tidak lagi memiliki cukup tenaga untuk melakukan pekerjaan sebagai perdana menteri.

“Sudah waktunya. Saya pergi,” ujar Ardern, sambil menahan air matanya, dilaporkan The Guardian.

Ardern mengatakan dia telah merenungkan pengunduran dirinya selama liburan musim panas. Ardern memikirkan apakah dia memiliki energi untuk melanjutkan tugasnya sebagai perdana menteri. Pada akhirnya Ardern menyimpulkan bahwa dia tidak bisa melanjutkan tugasnya.

Masa jabatan Ardern sebagai perdana menteri akan berakhir paling lambat 7 Februari. Ardern menjadi kepala pemerintahan wanita termuda di dunia ketika dia terpilih sebagai perdana menteri pada 2017 di usia 37 tahun. Dia telah memimpin Selandia Baru melewati pandemi Covid-19, dan peristiwa besar lainnya termasuk serangan teror di dua masjid di Christchurch, dan erupsi vulkanik di White Island.

“Saya harap saya meninggalkan warga Selandia Baru dengan keyakinan bahwa Anda bisa menjadi baik tetapi kuat, berempati tetapi tegas, optimis tetapi fokus. Dan bahwa Anda bisa menjadi pemimpin bagi diri Anda sendiri, yang tahu kapan waktunya untuk pergi,” kata Ardern.

Ardern mengatakan tidak ada skandal rahasia di balik pengunduran dirinya. Dia mengatakan, pengunduran dirinya murni karena keputusan pribadi. Ardern mengatakan, keputusan ini mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya.

“Saya pergi karena dengan pekerjaan istimewa seperti ini ada tanggung jawab besar. Tanggung jawab untuk mengetahui kapan Anda adalah orang yang tepat untuk memimpin, dan juga kapan Anda tidak. Saya tahu kapan saya memiliki cukup sisa energi untuk melakukannya dengan adil,” ujar Ardern.

Pasangan Ardern, Clarke Gayford, menemaninya selama konferensi pers. Dalam pidatonya, Ardern mengatakan, dia tidak sabar untuk mengantarkan anaknya, Neve pergi ke sekolah.

“Untuk Neve, ibu sangat menantikan untuk berada di sana saat kamu mulai sekolah tahun depan. Dan untuk Clarke, mari kita menikah,” ujar Ardern sambil tersenyum.

Ardern mengatakan, kaukus partai terkejut dengan pengunduran dirinya. Namun mereka bisa memahami keputusannya. Ardern mengatakan, dia tidak menyesali keputusan ini.

Sementara itu, Oleksiy Arestovych, penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, mengundurkan diri setelah mendapat kritik keras atas komentarnya tentang serangan rudal mematikan di Dnipro.

Sedikitnya 45 orang tewas ketika sebuah bangunan apartemen di Dnipro dihantam rudal pada Sabtu, serangan rudal tersebut telah menyebabkan 230 apartemen rusak dan 72 lainnya hancur total.

Dalam sebuah video di YouTube, Arestovych mengatakan bangunan itu kemungkinan dihantam oleh rudal Rusia yang ditembak jatuh oleh Ukraina, yang mana komentar tersebut telah memicu kemarahan publik.

Meminta maaf atas ucapannya, penasihat presiden Ukraina mengatakan dia telah membuat “kesalahan fatal” dan pengunduran dirinya adalah “contoh perilaku beradab”. ● ans

## Guterres Sebut Perusahaan Minyak Besar Lakukan Kebohongan Terkait Iklim

**DAVOS (IM)** - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menuding perusahaan-perusahaan minyak besar melakukan “kebohongan besar” terkait perubahan iklim. Pernyataan tersebut disampaikan Guterres ketika menyampaikan pidato di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (19/1).

“Hari ini, produsen bahan bakar fosil dan pendukung mereka masih berlomba untuk memperluas produksi, (meskipun) mengetahui sepenuhnya bahwa model bisnis mereka bertentangan dengan kelangsungan hidup manusia,” kata Guterres.

Menyerukan agar mereka yang bertanggung jawab atas hal ini dimintai pertanggungjawaban, Guterres mengatakan dunia sedang “bermain-main dengan bencana iklim,” dengan emisi gas mencapai rekor tertinggi.

Dia memperingatkan akan ancaman bencana iklim karena komitmen dalam Perjanjian Paris 2016 untuk membatasi kenaikan suhu global menjadi 1,5 derajat Celsius “tampaknya sia-sia” ketika dunia menuju kenaikan suhu bumi sebesar 2,8 derajat Celsius. “Konsekuensinya akan sangat menghancurkan. Beberapa bagian planet kita tidak dapat dihuni. Dan bagi banyak orang, ini adalah hukuman mati,” tutur Guterres.

Menurut Guterres, sejak tahun 1970-an, para produsen bahan bakar fosil tertentu sudah sepenuhnya sadar bahwa produk utama mereka sedang memanggang planet bumi.

“Sama seperti industri tembakau, mereka mengabaikan sains mereka sendiri. Big Oil menajakan kebohongan besar dan seperti industri tembakau, mereka yang bertanggung jawab (atas perubahan iklim) harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Guterres, merujuk pada perusahaan-perusahaan minyak besar.

“Seluruh dunia menghadapi perlambatan. Kita melihat ketidaksetaraan yang semakin dalam dan krisis biaya hidup yang berlangsung cepat... Naiknya suku bunga seiring dengan inflasi dan tingkat utang yang melanda negara-negara yang rentan,” kata dia.

Guterres menggaris-bawahi bahwa Covid-19 masih membebani ekonomi bahkan di tengah “kegagalan dunia untuk mempersiapkan pandemi di masa depan.”

“Entah bagaimana, setelah semua yang telah kita alami, kita belum belajar mengenai pelajaran kesehatan masyarakat global dari pandemi. Kita belum siap menghadapi pandemi yang akan datang,” kata Guterres. ● gul



XINHUA

## FORMEX SPRING 2023

Orang-orang mengunjungi Formex Spring 2023 di Stockholm, Swedia, Rabu (18/1). Formex Spring 2023 selama empat hari dimulai pada hari Selasa bertujuan menyroti tren desain interior Nordik terbaru.